

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI JAMBI

M. Zahari MS¹

Abstract

Jambi province is a province in Indonesia are quite rich in natural resources, good earth is a result of oil and gas, a new stone, gold and others, as well as the results of the plantation of oil palm, rubber, pineapple, coconut, tea and other sectors. However, the problem of whether natural wealth belonging to the seoptimal might have can be utilized so as to support economic growth in the province of Jambi.

This research goal seeking to know the picture of economical progress based on economic growth and income per person on each of the regency / a city in Jambi. An object research is that the entire district / a city in jambi by using data skunder of domestik regional products gross (PDRB) and the inhabitants of the district/a city in Jambi 2000-2010. The approach used is descriptive heading for : analysis of economic growth, and analysis klassen typology .

This research result explained that economic growth jambi during periods of 2000-2010 continued to increase, with average grew by 6,21 percent. based on analysis of klassen typology, the experiencing self rapidly progressing and fast growing is district Tanjung Jabung Barat. The forward but depressed is district Tanjung Jabung Timur and city Jambi, includes the cities of the full. Classifications developing areas fast was district Sarolangun and Bungo. the region economic growth is relatively lagging Batanghari district , Muaro Jambi, Merangin, Kerinci, and Tebo.

Keyword : domestik regional products gross, economic growth, Income Perkapita.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan haruslah dapat memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan tujuan dan strategi pembangunan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus diarahkan pada hal-hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan tradisional. Beberapa ekonomi modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin timpang dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan yang mulai menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, 2003).

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antardaerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecenderungan pemilik

modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil. Disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi kepada daerah seperti propinsi atau kecamatan (Kuncoro, 2004)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Williamson dalam Sjafrizal (2008) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penelitiannya menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan negara berkembang. Ternyata ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan

¹ Dosen Fak. Ekonomi Universitas Batanghari

terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (backwash effects) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effects) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan antar daerah. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Arsyad, 1999; Blakely, 1989). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor.

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan (Produk Domestik

Bruto) PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Arsyad, 1999).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu alat untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah, diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan. Dengan memperhatikan besarnya peranan masing-masing dalam PDRB, skala prioritas pembangunan dapat ditentukan.

Tingkat pertumbuhan riil PDRB atau yang lebih populer dengan istilah Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan per kapita daerah dalam jangka panjang, dan merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu wilayah.

PDRB dapat dihitung berdasarkan beberapa pendekatan antara lain pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan penggunaan/pengeluaran. Penghitungan PDRB dengan ketiga cara di atas secara konsep hasilnya sama. Sampai saat ini BPS Provinsi Jambi telah menghitung PDRB dengan dua pendekatan yakni pendekatan produksi dan pendekatan penggunaan/pengeluaran.

Perkembangan PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku tahun 2009 sebesar Rp.42.815,92 miliar sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai Rp.16.272,23 miliar. Berdasarkan harga berlaku selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 berkembang 4,47 kali lebih besar dibandingkan tahun 2000. Berdasarkan harga konstan PDRB Provinsi Jambi berkembang 1,7 kali lebih besar dibandingkan tahun 2000.

Tabel 1
PDRB ADHB, PDRB ADHK 2000 dan Indeks Perkembangan
di Provinsi Jambi Tahun 2000-2009 (Dengan Migas)

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK 2000	
	(Rp.Juta)	Indek Perkembangan (%)	(Rp.Juta)	Indek Perkembangan (%)
2000	9.569.242	100,00	9.569.242	100,00
2001	11.531.784	120,51	10.205.592	106,65
2002	13.940.538	145,68	10.803.423	112,90
2003	15.928.521	166,46	11.343.280	118,54
2004	18.487.944	193,20	11.953.885	124,92
2005	22.487.011	234,99	12.619.972	131,88
2006	26.061.774	272,35	13.363.621	139,65
2007	32.076.677	335,21	14.275.161	149,18
2008	41.056.484	429,05	15.297.771	159,86
2009	42.815.923	447,43	16.272.259	170,05

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Indikator Ekonomi, Tahun 2000 – 2009

Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tampaknya lebih perlu diperhatikan. Strategi alokasi anggaran tersebut harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi, 1997).

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi/daerah yang cukup kaya dengan sumber daya alam baik dengan hasil bumi berupa migas, batu bara, emas dan hasil perkebunan berupa kelapa sawit, nenas, kelapa, karet, teh dan sektor lainnya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan apakah kekayaan alam yang dimiliki telah dapat memanfaatkan seoptimal mungkin sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Sedangkan tujuannya untuk mengetahui kemajuan ekonomi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita pada masing-masing daerah atau kabupaten/kota di

Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada daerah Provinsi Jambi. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari pihak terkait seperti Bappeda dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah data *time series* periode tahun 2000 – 2010. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut;

1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Per tahun

$$LPE = \frac{P_t - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Dimana:

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

P_t = PDRB Atas Harga Konstan tahun t (Terakhir)

P_0 = PDRB Atas Harga Konstan tahun awal (tahun dasar)

- b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata (LPE - R)

$$LPE - R = \left(\sqrt[n-1]{\frac{P_t}{P_0}} \right) - 1 \times 100\%$$

Dimana:

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

P_t = PDRB Atas Harga Konstan tahun t (Terakhir)

P_0 = PDRB Atas Harga Konstan tahun awal (tahun dasar)
 N = Jumlah tahun (periode)

2. Analisis Klassen Typology

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan klasifikasi ekonomi dan mengidentifikasi posisi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Menurut Sjafrizal (1997:180) Analisis ini didasarkan pada dua indikator utama yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan per kapita di suatu daerah. Analisis ini membagi empat klasifikasi daerah yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu:

a. Kuadran I yaitu daerah maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan

perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.

b. Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan (*low growth but high income*) merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi-nya lebih rendah tapi pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.

c. Kuadran III yaitu daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.

d. Kuadran IV yaitu daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.

Tabel 2
Klassen Typology Daerah

Laju Pertumbuhan (r) \ PDRB per kapita (y)	($y_1 > y$)	($y_1 < y$)
($r_1 > r$)	Klasifikasi I Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh	Klasifikasi II Daerah Maju Tapi Tertekan
($r_1 < r$)	Klasifikasi III Daerah Berkembang Cepat	Klasifikasi IV Daerah Relatif Tertinggal

Sumber : Mudrajat Kuncoro(2002)

Keterangan :

r = Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

y = Rata – rata PDRB per kapita kabupaten/kota

r_1 = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang diamati (i)

y_1 = PDRB per kapita kabupaten/kota yang diamati (i)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Struktur Ekonomi

Distribusi PDRB menurut sektor atas dasar harga berlaku menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi pada tahun tersebut. Sampai tahun 2009, sektor pertanian masih mendominasi sektor-sektor perekonomian di Provinsi Jambi. Walaupun sempat pada tahun 2008 sektor Pertambangan dan Penggalan menggeser peran sektor Pertanian. Pada tahun 2009 ini peran sektor Pertanian 26,51 persen. Sub sektor Tanaman Perkebunan memberi

sumbangan tertinggi terhadap sektor ini setiap tahunnya, dari tahun 2006 hingga tahun 2009 sumbangannya berturut-turut : 13,16 persen (tahun 2006), 12,24 persen (tahun 2007), 11,27 persen (tahun 2008) dan 12,21 persen pada tahun 2009 .

Sektor penyumbang terbesar kedua dalam perekonomian Jambi adalah Pertambangan dan Penggalan dengan peranannya sebesar 18,15 persen di tahun 2009. Sub sektor Minyak dan Gas Bumi memberi sumbangan tertinggi yaitu 15,42 persen terhadap sektor ini.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran tahun 2009 berperan sebesar 15,19 persen sebagai penyumbang terbesar ke tiga dalam pembentukan PDRB Provinsi Jambi. Sektor Industri Pengolahan menduduki tempat ke empat sebesar 11,85 persen. Selanjutnya sektor jasa-jasa pada tahun 2009 berperan sebesar 10,30 persen; sektor Pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,08 persen. Sektor

Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang peranannya hanya sebesar 5,24 persen; sektor Bangunan sebesar 4,82 persen. Sedangkan Sektor Listrik dan air bersih memberi kontribusi terkecil dalam PDRB Provinsi Jambi, yakni 0,86 persen, meski demikian sub sektor ini merupakan penunjang sektor-sektor lainnya.

Sumbangan sektor ekonomi tanpa migas terhadap PDRB Provinsi Jambi hingga tahun

2009 diatas 80% kecuali pada tahun 2008 sebesar 76,17 persen. Penurunan ini, akibat terimbasnya gejolak krisis ekonomi dunia pada tahun 2008 dimana harga karet dan kelapa sawit anjlok.

Secara keseluruhan, struktur perekonomian Provinsi Jambi selama periode 2000-2009 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3
Struktur Perekonomian Provinsi Jambi
Tahun 2000–2009

No	Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	32,18	30,55	29,84	29,69	28,75	26,92	27,53	26,08	23,85	26,51
2	Pertambangan & Penggalian	12,46	16,34	17,28	15,66	15,65	18,07	15,86	18,96	25,64	18,15
3	Industri Pengolahan	14,72	14,27	13,82	12,72	12,41	12,02	11,92	11,84	11,15	11,85
4	Listrik dan Air Bersih	0,57	0,59	0,74	0,98	1,03	0,97	1,01	0,90	0,80	0,86
5	Bangunan	2,14	2,02	2,58	3,31	3,93	4,36	4,56	4,59	4,32	4,82
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	16,82	16,38	15,92	15,35	15,08	15,29	16,37	14,88	13,76	15,19
7	Angkutan & Komunikasi	7,83	7,63	7,19	7,08	6,88	7,16	7,57	7,31	6,34	7,08
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,81	3,23	3,17	3,80	4,26	3,99	3,90	4,25	4,40	5,24
9	Jasa-jasa	9,48	8,99	9,47	11,42	12,01	11,22	11,26	11,16	9,77	10,32
PDRB Dengan Migas		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PDRB Tanpa Migas		88,11	84,21	82,59	84,45	84,74	81,84	84,72	81,66	76,17	83,50

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Indikator Ekonomi, Tahun 2000 – 2009

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2000. Selama periode 2001–

2009, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berfluktuasi, baik berdasarkan PDRB ADHK dengan migas maupun tanpa migas, gambar tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Jambi
Tahun 2001 – 2009

No	Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	3,71	4,85	3,56	5,08	4,61	11,34	4,57	5,72	6,56
2	Pertambangan & Penggalian	29,39	-1,52	2,82	0,65	1,04	-7,29	9,60	14,70	0,71
3	Industri Pengolahan	3,63	10,09	2,36	3,55	3,90	4,44	5,45	5,63	4,86
4	Listrik dan Air Bersih	6,04	16,05	22,10	13,03	5,10	7,38	4,47	7,28	9,27
5	Bangunan	1,66	33,98	26,79	25,75	20,48	6,67	14,58	10,28	8,45
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	2,84	5,67	6,32	6,03	9,04	7,90	6,25	3,99	7,56
7	Angkutan & Komunikasi	8,10	5,36	4,94	6,47	7,10	5,94	7,14	3,37	5,81

8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-8,93	3,13	13,98	14,38	8,42	5,77	19,06	23,88	17,85
9	Jasa-jasa	4,42	9,67	4,82	3,48	3,21	4,07	5,62	4,99	6,24
PDRB Dengan Migas		6,65	5,86	5,00	5,38	5,57	5,89	6,82	7,16	6,37
PDRB Tanpa Migas		3,47	6,19	5,55	6,48	6,25	8,35	6,58	7,37	6,90

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Indikator Ekonomi, Tahun 2000 – 2009

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi berdasarkan PDRB ADHK tahun 2000 dengan migas pada tahun 2009 sebesar 6,37 persen atau menurun dibandingkan dengan tahun 2008 yang tumbuh sebesar 7,16 persen. Demikian pula dengan tanpa migas tumbuh sebesar 6,90 persen atau turun dari tahun 2008 yang tumbuh sebesar 7,37 persen.

Dilihat dari sektor-sektornya, pada tahun 2009 seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi, dialami oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yaitu sebesar 17,85 persen. Sektor lainnya masing-masing tumbuh sebagai berikut: sektor Listrik dan Air Bersih sebesar 9,27 persen; sektor Bangunan sebesar 8,45 persen; sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mampu tumbuh sebesar 7,56 persen, sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 6,56 persen;

sektor Jasa-jasa 6,24 persen; sektor Angkutan dan Komunikasi tumbuh sebesar 5,81 persen; sektor Industri Pengolahan sebesar 4,86 persen; dan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,86 persen.

Pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota pada tahun 2010 pertumbuhan yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 8,35 persen, Kabupaten Merangin sebesar 7,85 persen dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 6,88 persen. Secara rata-rata selama kurun waktu 10 tahun periode tahun 2001 – 2010 pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu rata-rata sebesar 7,37 persen, Kabupaten Sarolangun sebesar 6,95 persen dan Kabupaten Bungo sebesar 6,57 persen. Ketiga kabupaten ini melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 6,21 persen.

Tabel 5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi
Tahun 2001 – 2010

Daerah	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rerata
Kerinci	3,76	4,40	4,79	5,00	5,08	5,31	5,89	5,86	5,88	5,89	5,19
Merangin	3,61	3,70	4,07	4,85	5,19	4,80	7,02	5,99	8,42	7,85	5,55
Sarolangun	7,94	5,80	5,19	5,88	5,36	7,82	7,27	7,92	7,99	8,35	6,95
Batang Hari	7,23	4,14	4,02	5,19	5,84	5,12	5,60	6,24	5,14	6,05	5,46
Muaro Jambi	8,57	2,18	3,38	3,95	4,62	4,84	4,86	5,23	5,52	5,29	4,84
Tanjung Jabung Timur	8,83	7,96	2,38	3,19	3,67	5,88	4,71	5,71	5,00	5,56	5,29
Tanjung Jabung Barat	7,40	7,47	7,89	7,95	7,81	7,91	7,97	5,99	6,39	6,88	7,37
Tebo	4,15	4,25	4,31	4,79	4,74	9,69	5,95	6,08	5,01	6,43	5,54
Bungo	3,85	4,45	4,74	4,78	5,39	9,43	8,80	11,13	6,39	6,73	6,57
Kota Jambi	5,28	3,68	4,85	5,16	5,69	5,93	7,16	6,14	6,47	6,66	5,70
Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30	6,00	6,15
Provinsi Jambi	6,65	5,86	5,00	5,38	5,57	5,89	6,82	7,16	6,39	7,33	6,21

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Indikator Ekonomi, Tahun 2001 – 2010

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita, mencerminkan pendapatan penduduk provinsi Jambi yang tak lepas dari pengaruh besarnya PDRB dari tahun ke tahunnya. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tersebut tidak dapat

dijadikan sebagai ukuran peningkatan kemakmuran ekonomi maupun penyebaran pendapatan di setiap strata ekonomi, karena pengaruh inflasi masih sangat dominan dalam pembentukan besaran PDRB maupun PDRN tersebut. Namun dapat dijadikan acuan bagi

daerah untuk mengukur kemampuan dan kemajuan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi.

PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku terus mengalami kenaikan dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Pada tahun 2000 sebesar Rp. 3,97 juta dan pada tahun 2010 menjadi Rp. 16,56 juta; berarti ada kenaikan rata-rata sebesar Rp. 9,49 juta per tahun atau meningkat sebesar 324,69 persen.

Kabupaten/kota, yang menunjukkan PDRB per kapita atas harga berlaku yang paling tinggi pada tahun 2010 adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar Rp. 43,95 juta, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rp. 24,15 juta, Kota Sungai Penuh Rp. 18,45 juta dan Kota Jambi Rp. 17,12 juta. Keempat daerah ini melebihi PDRB per kapita atas harga berlaku Provinsi Jambi sebesar Rp.16,56 juta.

Tabel 6
PDRB Per Kapita Provinsi Jambi
Tahun 2000 – 2010 (Rp. Jt)

Kab/ Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Kerinci	2,29	2,60	3,16	3,86	4,39	5,18	5,89	6,67	7,67	11,35	13,38	6,04
Merangin	2,72	3,10	3,53	4,06	4,55	5,34	5,89	6,79	7,90	9,42	9,80	5,73
Sarolangun	3,54	4,15	4,75	5,67	6,57	7,75	9,59	11,90	12,48	14,89	16,15	8,86
Batang Hari	3,68	4,49	5,24	5,89	6,65	7,82	8,91	10,67	13,04	14,38	16,06	8,80
Muaro Jambi	3,14	3,76	4,37	4,67	5,44	6,28	7,22	8,14	9,95	11,11	11,66	6,88
Tanjung Jabung Timur	7,49	9,32	11,76	13,03	14,71	17,64	19,80	22,62	30,27	36,08	43,95	20,60
Tanjung Jabung Barat	5,40	6,39	7,36	8,80	10,72	12,76	14,07	16,07	20,36	22,01	24,15	13,46
Tebo	2,40	2,80	3,18	4,03	4,63	4,97	5,79	6,47	7,70	8,50	8,80	5,39
Bungo	3,15	3,58	4,12	4,79	5,47	6,19	7,23	8,60	11,04	12,24	13,31	7,25
Kota Jambi	4,72	5,45	6,17	7,12	8,01	9,68	11,06	12,61	14,77	16,43	17,12	10,29
Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,64	18,45	17,55
Provinsi Jambi	3,97	4,73	5,61	6,20	7,06	8,53	9,71	11,70	14,72	15,57	16,56	9,49

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Indikator Ekonomi, Tahun 2000 – 2010

Secara rata-rata selama periode tahun 2000 – 2010 di luar Kota Sungai Penuh, Kabupaten yang melebihi rata-rata Provinsi Jambi adalah Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 20,60 juta, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rp.13,46 juta, dan Kota Jambi Rp. 10,29 juta.

Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Klassen Typology

Analisis Klassen Typology digunakan untuk membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB per kapita, daerah yang diamati dibagi dalam empat klasifikasi, yaitu: (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*); (2) daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*); (3) daerah berkembang cepat (*high growth but low income*); dan (4) daerah relatif tertinggal

(*low growth and low income*).

Berdasarkan hasil pengelompokan dengan Klassen Typology yang menggunakan rata-rata pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita tahun 2000-2010, hanya satu kabupaten yang termasuk dalam klasifikasi daerah yang maju dan tumbuh cepat, yaitu Tanjung Jabung Barat. Kabupaten ini memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita diatas rata-rata provinsi. Hal ini disebabkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang berupa barang tambang, yang mampu memacu perekonomian Tanjung Jabung Barat. Selain dari sektor migas, kabupaten ini juga mendapat pemasukan yang cukup besar dari sektor industri pengolahan yaitu dari industri kertas.

Klasifikasi daerah maju tapi tertekan yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi, termasuk Kota Sungai Penuh.

Ketiganya adalah daerah yang memiliki PDRB per kapita diatas rata-rata provinsi tetapi dalam periode penelitian mengalami pertumbuhan yang relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata Provinsi Jambi.

Pada klasifikasi daerah yang berkembang cepat terdapat dua kabupaten yaitu Sarolangun dan Bungo. Daerah ini mempunyai potensi yang besar sehingga pertumbuhannya cepat, namun pendapatannya masih dibawah pendapatan rata-rata provinsi. Rendahnya pendapatan ini juga dipengaruhi oleh besar/kecilnya jumlah penduduk yang ada di dua kabupaten tersebut.

Daerah yang relatif tertinggal terdapat lima kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Merangin, Tebo, dan Kerinci. Wilayah yang masuk pada kategori ini, pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya lebih rendah dari rata-rata provinsi.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa plot kabupaten/kota cenderung berkumpul mendekati garis rata-rata, hal ini mengindikasikan bahwa klasifikasi pembangunan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi relatif merata.

Pengklasifikasian berdasar-kan Klassen Typology ini bersifat dinamis karena sangat tergantung pada perkembangan kegiatan pembangunan pada masing-masing kabupaten/kota maupun provinsi yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa dalam periode waktu penelitian yang berbeda, pengklasifikasian akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan laju pertumbuhan dan tingkat PDRB per kapita di masing-masing daerah pada saat itu.

KESIMPULAN

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 tumbuh sebesar 7,33 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,37 persen. Selama periode tahun 2009 – 2010 rata-rata tumbuh sebesar 6,21 persen.
2. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata PDRB masing-masing daerah kabupaten/kota yang tumbuh di atas rata-rata provinsi, atau daerah yang termasuk daerah yang mengalami cepat maju dan cepat tumbuh adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk daerah yang maju tapi tertekan adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

dan Kota Jambi, termasuk Kota Sungai Penuh. Klasifikasi daerah berkembang cepat atau pertumbuhan cepat adalah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo. Sedangkan daerah yang pembangunan atau pertumbuhan ekonominya relatif tertinggal adalah Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Merangin, Kerinci, dan Tebo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan-an Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- , 2004. *Ekonomi Pembangunan-an*: edisi kedua, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2010, *Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)*, beberapa terbitan, BPS Jambi. Jambi
- , 2010. *Propinsi Jambi dalam Angka tahun 2010*, BPS Jambi. Jambi
- Blakely, E.J. 1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. California: SAGE Publication, Inc
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta
- , 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Majidi, N. 1997. *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*. Prisma, LP3S No 3 Tahun XXVI. Jakarta.
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma LP3ES, No 3 Tahun XXVI. Jakarta.
- , 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose. Padang
- Todaro, M.P. 2000. *Economic Development*, Seventh Edition, New York, Addition WesleyLongman, Inc. (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Jakarta: Erlangga.